



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

JL. DI. PANJAITAN KAV. 24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA  
TELEPON : 021 - 8580067-69, EXT : 135 FAKSIMILE : 021 - 858007, 8580104, SITUS : www.ppkl.menlh.go.id

Nomor : S. 233/PP/KC/SET.6/SET.1/5/2022 31 Mei 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Tema, Panduan Visual, dan Surat Edaran dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di 34 Provinsi di seluruh Indonesia;
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
  3. Pimpinan Perusahaan; dan
  4. Ketua Asosiasi Perusahaan
- di-

Tempat

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022 (HLH 2022) sekaligus 50 Tahun Konvensi Stockholm yang telah melahirkan perjanjian internasional dan kebijakan lingkungan hidup secara global telah ditetapkan bahwa tema internasional peringatan HLH 2022 adalah **"Only One Earth"** dengan tuan rumah penyelenggaraan adalah Stockholm – Swedia. Tema Internasional tersebut dipilih dengan tujuan mengajak seluruh masyarakat dunia untuk hidup berkelanjutan dan harmonis dengan alam.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tema nasional peringatan HLH 2022 adalah **"SATU BUMI UNTUK MASA DEPAN"** serta panduan visual publikasi dan kehumasan yang bertujuan untuk mengharmonisasikan aspek publikasi sebagaimana termuat dalam tautan: <https://bit.ly/PanduanHLH2022> dan asset visual dalam tautan: <https://bit.ly/VisualHLH2022>.

Selain itu, kami juga menyampaikan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Gerakan Bersepeda dan Kerja Bakti Bersih Lingkungan Serempak di Seluruh Indonesia dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022 sebagaimana terlampir agar dapat dipedomani dan dilaksanakan untuk memeriahkan HLH 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

  
**Sigit Reliantoro**  
NIP. 19681111 199503 1 001

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur di 34 Provinsi; dan
4. Bupati/Walikota di 514 Kabupaten/Kota

Lampiran Surat

Nomor : S. 233/PPPL/SET.6/SET.1/5/2022

Tanggal : 31 Mei 2022

Daftar Nama Penerima Surat

Kepada Yth.:

**A. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi**

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
30. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
31. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
32. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
33. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua

**B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kabupaten/Kota**

**a. Provinsi Aceh**

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhoksumawe
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam

**b. Provinsi Sumatera Utara**

24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan:
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang
28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan
29. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
30. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu
31. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan
32. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara
33. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat
34. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal
35. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias
36. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Barat
37. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan
38. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara
39. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas
40. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara
41. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Barat
42. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
43. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai
44. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
45. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan
46. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah
47. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
48. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir
49. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
50. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
51. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
52. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan
53. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar
54. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sibolga
55. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
56. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

**c. Provinsi Sumatera Barat**

57. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam
58. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
59. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai
60. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota
61. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman
62. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman
63. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
64. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
65. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung
66. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
67. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan
68. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar
69. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
70. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
71. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangpanjang
72. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
73. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
74. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto
75. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

**d. Provinsi Riau**

76. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
77. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir
78. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
79. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
80. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti
81. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi
82. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan
83. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
84. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu
85. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
86. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
87. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

**e. Provinsi Kepulauan Riau**

88. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan
89. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
90. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas
91. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga
92. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna
93. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
94. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

**f. Provinsi Jambi**

95. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari
96. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
97. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
98. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin
99. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
100. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun
101. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
102. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung

103. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
104. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
105. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungaipenuh

**g. Provinsi Bengkulu**

106. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan
107. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah
108. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara
109. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur
110. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
111. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
112. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko
113. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
114. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma
115. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

**h. Provinsi Sumatera Selatan**

116. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin
117. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang
118. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat
119. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
120. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
121. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
122. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara
123. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
124. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir
125. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu
126. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
127. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
128. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
129. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau
130. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
131. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang
132. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

**i. Provinsi Bangka Belitung**

133. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka
134. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat
135. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan
136. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
137. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung
138. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
139. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

**j. Provinsi Lampung**

140. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
141. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
142. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
143. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
144. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara
145. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji
146. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
147. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat
148. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu

149. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus
150. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang
151. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat
152. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
153. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
154. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

**k. Provinsi Banten**

155. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
156. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang
157. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang
158. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang
159. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
160. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
161. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
162. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

**l. Provinsi DKI Jakarta**

163. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
164. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
165. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
166. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
167. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
168. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

**m. Provinsi Jawa Barat**

169. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
170. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
171. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
172. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
173. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis
174. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
175. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
176. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut
177. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu
178. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang
179. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan
180. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
181. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran
182. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
183. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
184. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
185. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang
186. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya
187. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
188. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar
189. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
190. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
191. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
192. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
193. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok
194. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi
195. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya

**n. Provinsi Jawa Tengah**

196. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara
197. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
198. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
199. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora
200. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
201. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes
202. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
203. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
204. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
205. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
206. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
207. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
208. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
209. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
210. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
211. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
212. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati
213. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan
214. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemasang
215. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
216. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo
217. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
218. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
219. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
220. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
221. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
222. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
223. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
224. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
225. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
226. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
227. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga
228. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
229. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
230. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

**o. Provinsi Jawa Timur**

231. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
232. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
233. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar
234. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
235. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso
236. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
237. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
238. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
239. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri
240. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
241. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
242. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun
243. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
244. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
245. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

246. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
247. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
248. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
249. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan
250. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
251. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
252. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo
253. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang
254. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo
255. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo
256. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep
257. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
258. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban
259. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
260. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu
261. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar
262. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kediri
263. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun
264. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
265. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
266. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan
267. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
268. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

**p. Provinsi DI. Yogyakarta**

269. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
270. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
271. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
272. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
273. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

**q. Provinsi Bali**

274. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung
275. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli
276. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
277. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
278. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana
279. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
280. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
281. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
282. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

**r. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

283. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima
284. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu
285. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
286. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
287. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur
288. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara
289. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa
290. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat
291. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima
292. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

**s. Provinsi Nusa Tenggara Timur**

293. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor
294. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
295. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende
296. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur
297. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang
298. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
299. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka
300. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai
301. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat
302. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur
303. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo
304. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada
305. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao
306. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua
307. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
308. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat
309. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya
310. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah
311. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur
312. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Selatan
313. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara
314. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang

**t. Provinsi Kalimantan Barat**

315. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang
316. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas hulu
317. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara
318. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang
319. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya
320. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
321. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi
322. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah
323. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
324. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau
325. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
326. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
327. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
328. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

**u. Provinsi Kalimantan Selatan**

329. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
330. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
331. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
332. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan
333. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah
334. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara
335. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru
336. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
337. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
338. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
339. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
340. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
341. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

**v. Provinsi Kalimantan Tengah**

- 342. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
- 343. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
- 344. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
- 345. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas
- 346. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas
- 347. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
- 348. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
- 349. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur
- 350. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau
- 351. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya
- 352. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau
- 353. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamar
- 354. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan
- 355. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

**w. Provinsi Kalimantan Timur**

- 356. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
- 357. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
- 358. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
- 359. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
- 360. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu
- 361. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
- 362. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
- 363. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
- 364. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang
- 365. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

**x. Provinsi Kalimantan Utara**

- 366. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan
- 367. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
- 368. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
- 369. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung
- 370. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

**y. Provinsi Gorontalo**

- 371. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo
- 372. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
- 373. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo
- 374. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara
- 375. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato
- 376. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

**z. Provinsi Sulawesi Barat**

- 377. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majene
- 378. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamasa
- 379. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju
- 380. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah
- 381. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu
- 382. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar

**aa. Provinsi Sulawesi Selatan**

383. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng
384. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru
385. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone
386. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba
387. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang
388. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa
389. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto
390. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar
391. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
392. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur
393. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara
394. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros
395. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
396. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang
397. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
398. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjau
399. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng
400. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar
401. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja
402. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara
403. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo
404. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
405. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
406. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

**bb. Provinsi Sulawesi Tenggara**

407. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana
408. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton
409. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan
410. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah
411. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara
412. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka
413. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur
414. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara
415. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe
416. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan
417. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan
418. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara
419. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
420. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat
421. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
422. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-bau
423. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari

**cc. Provinsi Sulawesi Tengah**

424. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
425. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
426. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut
427. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol
428. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala
429. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali
430. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara
431. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong

- 432. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso
- 433. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi
- 434. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-una
- 435. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli
- 436. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

**dd. Provinsi Sulawesi Utara**

- 437. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
- 438. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 439. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 440. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 441. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 442. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 443. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Talaud
- 444. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
- 445. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan
- 446. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara
- 447. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara
- 448. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung
- 449. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu
- 450. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
- 451. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon

**ee. Provinsi Maluku**

- 452. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru
- 453. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan
- 454. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru
- 455. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya
- 456. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah
- 457. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara
- 458. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- 459. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat
- 460. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur
- 461. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon
- 462. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tual

**ff. Provinsi Maluku Utara**

- 463. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat
- 464. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah
- 465. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur
- 466. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan
- 467. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara
- 468. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula
- 469. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai
- 470. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu
- 471. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
- 472. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan

**gg. Provinsi Papua**

- 473. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Asmat
- 474. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Biak Numfor
- 475. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Boven Digoel
- 476. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Deiyai

477. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Dogiyai
478. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Intan Jaya
479. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Jayapura
480. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Jayawijaya
481. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Keerom
482. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Kepulauan Yapen
483. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Lanny Jaya
484. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Mamberamo Raya
485. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Mamberamo Tengah
486. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Mappi
487. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Merauke
488. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Mimika
489. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Nabire
490. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Nduga
491. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Paniai
492. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Pegunungan Bintang
493. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Puncak
494. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Puncak Jaya
495. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Sarmi
496. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Supiori
497. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Tolikara
498. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Waropen
499. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Yahukimo
500. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Yalimo
501. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kota Jayapura

**hh. Provinsi Papua Barat**

502. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak
503. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana
504. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari
505. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan
506. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maybrat
507. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pegunungan Arfak
508. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
509. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong
510. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan
511. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau
512. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni
513. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama
514. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong

**C. Asosiasi Perusahaan**

1. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia)
2. Ketua Indonesia Petroleum Association (IPA)
3. Ketua Asosiasi Lingkungan Ketenagalistrikan Indonesia (ALLIN)
4. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI)
5. Ketua Indonesia Mining Association (IMA)
6. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)
7. Ketua Gabungan Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)
8. Ketua Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (APADIN)
9. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
10. Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia (API)

11. Ketua Asosiasi Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS)
12. Ketua Gabungan Pengusaha kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
13. Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI)
14. Ketua Asosiasi Peleburan Timah

**D. Pimpinan Perusahaan**

1. Pimpinan Perusahaan PT Pertamina (Persero)
2. Pimpinan Perusahaan PT PLN (Persero)
3. Pimpinan Perusahaan PT Indonesia Power
4. Pimpinan Perusahaan PT Pembangkit Jawa Bali
5. Pimpinan Perusahaan PT Tirta Investama
6. Pimpinan Perusahaan PT Bio Farma
7. Pimpinan Perusahaan PT Star Energy
8. Pimpinan Perusahaan PT Industri Jamu Sido Muncul
9. Pimpinan Perusahaan PT Adaro Indonesia
10. Pimpinan Perusahaan PT Badak NGL
11. Pimpinan Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur
12. Pimpinan Perusahaan PT Kideco Jaya Agung
13. Pimpinan Perusahaan PT Medco Indonesia
14. Pimpinan Perusahaan PT Sahabat Mewah dan Makmur
15. Pimpinan Perusahaan PT Bukit Asam (Persero)
16. Pimpinan Perusahaan PT Aisin Indonesia
17. Pimpinan Perusahaan PT Hino Motors Manufacturing Indonesia
18. Pimpinan Perusahaan PT Cirebon Electric Power
19. Pimpinan Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero)
20. Pimpinan Perusahaan PT Phapros
21. Pimpinan Perusahaan PT Geo Dipa Energi (Persero)
22. Pimpinan Perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia
23. Pimpinan Perusahaan PT Borneo Indobara
24. Pimpinan Perusahaan PT Maju Aneka Sawit
25. Pimpinan Perusahaan PT Sukajadi Sawit Mekar
26. Pimpinan Perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur
27. Pimpinan Perusahaan PT Unggul Lestari
28. Pimpinan Perusahaan PT Berau Coal
29. Pimpinan Perusahaan BP Berau Ltd.
30. Pimpinan Perusahaan PT Musim Mas
31. Pimpinan Perusahaan PT Sinar Agro Raya
32. Pimpinan Perusahaan PT Agrowiratama
33. Pimpinan Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaya
34. Pimpinan Perusahaan PT Berkat Sawit Sejati
35. Pimpinan Perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)
36. Pimpinan Perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Agri
37. Pimpinan Perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda
38. Pimpinan Perusahaan PT Astra Agro Lestari
39. Pimpinan Perusahaan PT Perkebunan Nusantara
40. Pimpinan Perusahaan PT YKK AP Indonesia
41. Pimpinan Perusahaan PT Angels Product
42. Pimpinan Perusahaan PT LG Electronics
43. Pimpinan Perusahaan PT Propan Raya ICC
44. Pimpinan Perusahaan PT Yuasa Battery Indonesia
45. Pimpinan Perusahaan PT Astrindo Lestari Kimia
46. Pimpinan Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara

47. Pimpinan Perusahaan PT Gajah Tunggal
48. Pimpinan Perusahaan PT Surya Toto Indonesia
49. Pimpinan Perusahaan PT Arai Rubber Seal
50. Pimpinan Perusahaan PT Asahimas Chemical
51. Pimpinan Perusahaan PT Sulfindo Adiusaha
52. Pimpinan Perusahaan PT Rinnai Indonesia
53. Pimpinan Perusahaan PT Torabika Eka Semesta
54. Pimpinan Perusahaan PT. Nafasindo
55. Pimpinan Perusahaan PT. Coca Cola
56. Pimpinan Perusahaan PT. Sinar Sosro
57. Pimpinan Perusahaan PT. Propan Raya ICC
58. Pimpinan Perusahaan PT. Duta Sugar International
59. Pimpinan Perusahaan PT. Permata Dunia Sukses Utama
60. Pimpinan Perusahaan PT. MC PET Film Indonesia
61. Pimpinan Perusahaan PT Saka Indonesia Pangkah Limited
62. Pimpinan Perusahaan PT Multimas Nabati Asahan
63. Pimpinan Perusahaan PT Energi Unggul Persada
64. Pimpinan Perusahaan PT Bhima Sena Power Indonesia
65. Pimpinan Perusahaan PT Dover Chemical
66. Pimpinan Perusahaan PT Musimas
67. Pimpinan Perusahaan PT Sulfindo Adiusaha
68. Pimpinan Perusahaan PT Padang Raya Cakrawala
69. Pimpinan Perusahaan PT Growel Farm Indonesia
70. Pimpinan Perusahaan PT Mitrajaya Samudera
71. Pimpinan Perusahaan PT BP Petrochemical
72. Pimpinan Perusahaan PT Indorama Petrochemical
73. Pimpinan Perusahaan PT Mustika Minahasa Aurora
74. Pimpinan Perusahaan PT Minahasa Cahaya Lestari
75. Pimpinan Perusahaan PT DSSP Power
76. Pimpinan Perusahaan PT Salim Ivomas Pratama
77. Pimpinan Perusahaan PT Patra SK
78. Pimpinan Perusahaan PT Lotte Chemical Titan Nusantara
79. Pimpinan Perusahaan PT Jawa Satu Power
80. Pimpinan Perusahaan PT Sumber Segara Primadaya
81. Pimpinan Perusahaan PT Dabi Biofuels
82. Pimpinan Perusahaan PT Sentra Usaha Utama Jaya
83. Pimpinan Perusahaan PT. Iron Wire Works Indonesia
84. Pimpinan Perusahaan PT. Tridomain Chemicals
85. Pimpinan Perusahaan PT. Surya Toto Indonesia
86. Pimpinan Perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper
87. Pimpinan Perusahaan PT. Polychem Indonesia, Tbk.
88. Pimpinan Perusahaan PT. Inoac Polytechno Indonesia
89. Pimpinan Perusahaan PT. IRC Inoac Indonesia
90. Pimpinan Perusahaan PT. Mayora Indah
91. Pimpinan Perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
92. Pimpinan Perusahaan PT. Krakatau Steel (Persero)
93. Pimpinan Perusahaan PT. Castrol Manufacturing Indonesia
94. Pimpinan Perusahaan PT. YKK AP Indonesia
95. Pimpinan Perusahaan PT. Lautan Otsuka Chemical
96. Pimpinan Perusahaan PT. Standar Toyo Polymer (Statomer)
97. Pimpinan Perusahaan PT. Krakatau Daya Listrik
98. Pimpinan Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara

- 99. Pimpinan Perusahaan PT. Gajah Tunggal
- 100. Pimpinan Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II

Sekretaris Direktorat Jenderal,



**Fulis Laksono**

NIP. 197107131997031001



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

---

Yth.

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: SE. 3/MENLUK-PPKL/SET-6/SET.1/5/2022

TENTANG

GERAKAN BERSEPEDA DAN KERJA BAKTI BERSIH LINGKUNGAN  
SEREMPAK DI SELURUH INDONESIA DALAM RANGKA  
PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Konferensi Stockholm tahun 1972 adalah konferensi tingkat dunia pertama yang membahas isu lingkungan. Para peserta mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik termasuk Deklarasi Stockholm dan Rencana Aksi untuk Lingkungan.

Deklarasi Stockholm menandai dialog pertama negara industri dan negara berkembang yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran, dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia sekaligus menandai ditetapkannya tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menandai isu lingkungan diadopsi dalam kebijakan nasional sejak tahun 1972 antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup;
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara yang telah mengadopsi arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan;
3. Pembentukan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup.

Isu Lingkungan saat ini telah berkembang menjadi isu utama dan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan". Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tujuan kita bersama dan bagian pemenuhan Hak Asasi Manusia. Upaya pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diselenggarakan melalui komitmen bersama dan pencapaiannya digerakan oleh seluruh para pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai motor penggerak utama.

Pemerintah Indonesia pada periode kedua Presiden Joko Widodo, mempertegas isu lingkungan sebagai prioritas nasional dalam muatan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan melalui program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Melalui IKLH, pemerintah didorong untuk memenuhi target pencapaian kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan melalui program yang terintegrasi dengan melibatkan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Setelah lima dekade Konvensi Stockholm, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 secara internasional mengusung tema "*Only One Earth*", tema tersebut merupakan moto yang diperkenalkan dalam Konferensi Stockholm yang bertujuan mengajak seluruh negara untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan. Menindaklanjuti tema Internasional tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tema nasional HLH 2022 yaitu "Satu Bumi Untuk Masa Depan". Tema ini berfokus dan mengajak masyarakat dunia untuk hidup secara berkelanjutan dan harmonis dengan alam.

B. Maksud dan Tujuan:

1. mengajak seluruh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menyelenggarakan gerakan bersepeda dan kerja bakti bersih lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022;

2. memberikan panduan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menyelenggarakan gerakan bersepeda dan kerja bakti bersih lingkungan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022; dan
3. pelibatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan kampanye dan edukasi gerakan cinta lingkungan kepada seluruh pegawai dan pihak ketiga mitra kerja perusahaan untuk berpartisipasi dalam:
  - a. pengurangan emisi kendaraan bermotor dalam upaya pengendalian pencemaran udara;
  - b. gerakan bersih lingkungan ditingkat desa sebagai upaya untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
  - c. edukasi gaya hidup berkelanjutan dan harmonis dengan alam kepada masyarakat dan lintas generasi.

C. Ruang Lingkup:

Surat Edaran berisikan arahan untuk menyelenggarakan gerakan bersepeda dan kerja bakti bersih lingkungan di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia tahun 2022.

D. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

E. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022 akan diperingati secara serempak di seluruh Indonesia dengan menyelenggarakan:

1. Gerakan Bersepeda:
  - a. diselenggarakan sebagai kampanye dan edukasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengurangi emisi kendaraan bermotor dan upaya pengendalian pencemaran udara serta penerapan gaya hidup sehat berkelanjutan;
  - b. diselenggarakan bersama seluruh pimpinan, manajemen, dan pegawai di lokasi masing-masing;
  - c. diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 pada pukul 07.00 – 12.00 waktu setempat; dan
  - d. penetapan jalur gerakan bersepeda ditentukan oleh penyelenggara di setiap daerah dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ketertiban peserta dan target kampanye lingkungan.
2. Kerja Bakti Bersih Lingkungan:
  - a. diselenggarakan sebagai bentuk pelibatan seluruh manajemen dan pegawai untuk menjaga lingkungan di unit kerja serta penerapan gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan;
  - b. diselenggarakan pada hari Minggu, 5 Juni 2022 secara serempak dilakukan di wilayah kerja perusahaan pada pukul 07.00 – 12.00 waktu setempat; dan
  - c. diikuti oleh seluruh pimpinan, manajemen, dan pegawai pada di lokasi kerja setiap perusahaan melalui acara seperti gerakan bersih sungai, gerakan bersih pantai, atau gerakan bersih lingkungan kantor.

3. Koordinasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022

Dalam rangka menyukseskan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menyelenggarakan gerakan bersepeda dan gerakan kerja bakti bersih lingkungan secara bersama-sama dengan pihak lainnya seperti pemerintah daerah, komunitas masyarakat, atau instansi pendidikan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal diperlukan konsultasi Surat Edaran ini dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3/ Mei 2022

a.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN  
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN,

  
SIGIT RELIANTORO

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara; dan
6. Asosiasi Perusahaan.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

---

Yth.

1. Para Gubernur;
  2. Para Bupati; dan
  3. Para Walikota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: *SE. 4/MENCIHO-PRK/RET. 6/RET. 1/S/2022*

TENTANG

GERAKAN BERSEPEDA DAN KERJA BAKTI BERSIH LINGKUNGAN  
SEREMPAK DI SELURUH INDONESIA DALAM RANGKA  
PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Konferensi Stockholm tahun 1972 adalah konferensi tingkat dunia pertama yang membahas isu lingkungan. Para peserta mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik termasuk Deklarasi Stockholm dan Rencana Aksi untuk Lingkungan.

Deklarasi Stockholm menandai dialog pertama negara industri dan negara berkembang yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran, dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia sekaligus menandai ditetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menandai isu lingkungan diadopsi dalam kebijakan nasional sejak tahun 1972 antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup;
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara yang telah mengadopsi arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan;

3. Pembentukan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup.

Isu Lingkungan saat ini telah berkembang menjadi isu utama dan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan". Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tujuan kita bersama dan bagian pemenuhan Hak Asasi Manusia. Upaya pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diselenggarakan melalui komitmen bersama dan pencapaiannya digerakan oleh seluruh para pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai motor penggerak utama.

Pemerintah Indonesia pada periode kedua Presiden Joko Widodo, mempertegas isu lingkungan sebagai prioritas nasional dalam muatan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan melalui program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Melalui IKLH, pemerintah didorong untuk memenuhi target pencapaian kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan melalui program yang terintegrasi dengan melibatkan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Setelah lima dekade Konvensi Stockholm, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 secara internasional mengusung tema "*Only One Earth*", tema tersebut merupakan moto yang diperkenalkan dalam Konferensi Stockholm yang bertujuan mengajak seluruh negara untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan. Menindaklanjuti tema Internasional tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tema nasional HLH 2022 yaitu "Satu Bumi Untuk Masa Depan". Tema ini berfokus dan mengajak masyarakat dunia untuk hidup secara berkelanjutan dan harmonis dengan alam.

B. Maksud dan Tujuan:

1. memberikan arahan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk menyelenggarakan gerakan bersepeda dan kerja bakti bersih lingkungan serempak di seluruh Indonesia dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022;
2. memberikan panduan kepada gubernur, bupati, dan walikota dalam menyelenggarakan gerakan bersepeda dan kerja bakti bersih lingkungan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022; dan
3. melakukan kampanye dan edukasi gerakan cinta lingkungan kepada masyarakat antara lain:
  - a. pengurangan emisi kendaraan bermotor dalam upaya pengendalian pencemaran udara;
  - b. gerakan bersih lingkungan di setiap desa, rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) sebagai upaya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
  - c. edukasi gaya hidup berkelanjutan dan harmonis dengan alam kepada masyarakat dan lintas generasi.

C. Ruang Lingkup:

Surat Edaran berisikan arahan untuk menyelenggarakan gerakan bersepeda dan kerja bakti bersih lingkungan di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia tahun 2022.

D. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

E. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022 akan diperingati secara serempak di seluruh Indonesia dengan menyelenggarakan:

1. Gerakan Bersepeda:
  - a. diselenggarakan sebagai kampanye dan edukasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengurangi emisi kendaraan bermotor dan upaya pengendalian pencemaran udara serta penerapan gaya hidup sehat berkelanjutan;
  - b. diselenggarakan bersama antara seluruh pemangku kepentingan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat, institusi pendidikan yang melibatkan seluruh peserta didik, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di daerah masing-masing;
  - c. diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 pada pukul 07.00 – 12.00 waktu setempat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, masyarakat, pelajar, dan pelaku usaha di lokasi masing-masing; dan
  - d. penetapan jalur gerakan bersepeda ditentukan oleh penyelenggara di setiap daerah dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan ketertiban masyarakat dan target kampanye lingkungan.

2. Kerja Bakti Bersih Lingkungan:

- a. diselenggarakan sebagai bentuk pelibatan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tingkat desa dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta penerapan gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan;
- b. diselenggarakan pada hari Minggu, 5 Juni 2022 secara serempak dilakukan di setiap desa, rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) di seluruh Indonesia pada pukul 07.00 – 12.00 waktu setempat; dan
- c. diselenggarakan bersama oleh seluruh masyarakat melalui acara seperti gerakan bersih sungai, gerakan bersih pantai, atau gerakan bersih lingkungan yang dilakukan di desa, tempat tinggal, lingkungan kantor pemerintah, atau fasilitas pendidikan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal diperlukan konsultasi Surat Edaran ini dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3/ Mei 2022

a.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN  
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN,

  
  
SIGIT RELIANTORO

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi;

2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi